## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024. Laporan ini memuat informasi mengenai kebijakan layanan informasi, jumlah dan jenis permohonan informasi yang diterima, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, baik dari unsur internal maupun eksternal. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat pengguna layanan informasi yang telah memberikan kepercayaan kepada PPID Pembantu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Soreang, 21 Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

**H. MARLAN, S.IP., M.Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 196712231988031007

| | | |
|---|---|---|
| | 4.6. Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya | 41 |
| BAB V. | KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 43 |
| | 5.1. Kendala Internal | 43 |
| | 5.2. Kendala Eksternal | 43 |
| BAB VI. | REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK | 45 |
| BAB VII. | PENUTUP | 47 |

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I
# GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 1. Gambaran Umum PPID Pembantu

BAPPERIDA Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan BupatuIBandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2023, dengan tugas pokok Memimpin, Mengatur, Merumuskan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, Dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Dan Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Dan Penelitian Dan Pengembangan dan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di dalamnya ada tugas pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran penting dalam menyampaikan hasil kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) kepada publik. Salah satu tugas PPID adalah menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi serta dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Bapperida Kabupaten Bandung ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapperida Kabupaten Bandung Nomor 400.6.3.4/42/Sekret TAMGGAL 9 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Bapperida Kabupaten Bandung. Adapun Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Bapperida Kabupaten Bandung adalah:

a. Kepala Diskominfo selaku Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
    - Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
    - Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

b. Kepala Bapperida selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
   - Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan BAPPERIDA.
   - Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
   - Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi.

c. Sekretaris Bapperida selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
   - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
   - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.
   - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
   - Melakukan pemutakhiran atau Pembaharuan informasi dan dokumentasi;
   - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
   - Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peundang-undangan;
   - Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   - Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan BAPPERIDA;
   - Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
   - Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
   - Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantudan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BAPPERIDA.

d. Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
   - Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
   - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.

e. Sekretariat dan tiga Bidang membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
   - Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi.
   - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
   - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
   - Mengelola sistem informasi dan dokumentasi.
   - Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
   - Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.
   - Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi.
   - Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik.
   - Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
   - Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka, memenuhi permohonan informasi;
   - Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.
g. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.
   - Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
   - Melaksanakan koordinasi dan rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
   - Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;
   - Melaksankan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

h. Sekretariat
   - Melaksanakan penyusunan program/ kegiatan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi,
   - Melaksanakan pengumpulan informasi dan dokumentasi dari Sekretariat dan Bidang lingkup Bapperida.
   - Membantu melaksanakan koordinasi penyediaan data dan pelayanan informasi publik.
   - Membantu melaksanakan koordinasi pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
   - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
   - Melaksanakan pengadministrasian pelayanan informasi dan dokumentasi.

2. Layanan Informasi Publik Bapperida Kabupaten Bandung dilaksanakan berdasarkan:
   a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
   b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
   c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
   d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149).
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung

3. Kebijakan ini bertujuan untuk:
   a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

      Tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan publik. Penjabaran lebih spesifik dari tujuan ini meliputi:

      1) Meningkatkan Kepercayaan Publik
         - Dengan menyediakan informasi yang terbuka dan akurat, masyarakat dapat memahami proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil kerja pemerintah.
      2) Mendukung Partisipasi Masyarakat
         - Transparansi memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik.
      3) Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
         - Akuntabilitas mengurangi peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka.
      4) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
         - Keterbukaan informasi dan tanggung jawab yang jelas membantu pemerintah menjalankan program-programnya secara lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
      5) Meningkatkan Kredibilitas Pemerintah
         - Pemerintah yang transparan dan akuntabel cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

   b. Memastikan masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan daerah.
      1) Memperkuat Transparansi
         - Memberikan akses informasi pembangunan kepada masyarakat memastikan keterbukaan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

2) Meningkatkan Partisipasi Publik
   - Dengan akses informasi, masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3) Mendorong Akuntabilitas Pemerintah
   - Informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk memonitor realisasi program pembangunan, anggaran, dan dampaknya, sehingga pemerintah bertanggung jawab atas hasil kerjanya.
4) Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat
   - Akses informasi mempermudah masyarakat untuk memberikan masukan berbasis data, membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
5) Memberdayakan Masyarakat
   - Informasi pembangunan dapat digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

c. Mendukung perencanaan berbasis partisipasi masyarakat.
1) **Mewujudkan Pembangunan yang Responsif**
   - Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.
2) **Meningkatkan Kepemilikan Program oleh Masyarakat**
   - Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan menciptakan rasa memiliki terhadap program dan proyek pembangunan, sehingga meningkatkan keberlanjutan hasilnya.
3) **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**
   - Partisipasi masyarakat mendorong proses perencanaan yang terbuka dan akuntabel, sehingga mengurangi peluang penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.
4) **Memanfaatkan Pengetahuan Lokal**
   - Partisipasi memungkinkan pemerintah memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman lokal masyarakat untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi setempat.

5) **Mendorong Kesetaraan dan Inklusi**
   - Melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, memastikan bahwa perencanaan pembangunan mencerminkan keadilan sosial dan tidak meninggalkan siapa pun.
6) **Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat**
   - Proses partisipatif menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan pembangunan.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan layanan informasi publik yang mudah, cepat, akurat, dan akuntabel menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bandung sebagai institusi yang strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, berkomitmen untuk mewujudkan layanan informasi publik yang efektif dan efisien.

Dokumen *Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik* ini disusun sebagai pedoman untuk memastikan tersedianya fasilitas, media, serta infrastruktur pendukung layanan informasi yang memadai, terpadu, dan berorientasi pada kepuasan publik. Melalui pedoman ini, diharapkan Bapperida Kabupaten Bandung dapat menyelenggarakan layanan informasi yang tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan semangat transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelayanan publik.

Pada Tahun 2025 layanan informasi yang disampaikan Adalah:

A. RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta memperhatikan kondisi dan dinamika pembangunan daerah.

a. Pendapatan

| No. | Uraian | Realisasi APBD 2023 | RKPD 2024 | APBD 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 (Perubahan RPJMD 2021-2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **PENDAPATAN** | **6.361.706.741.689,30** | **4.962.213.864.493** | **5.311.111.764.911** | **5.517.122.950.033** | **4.804.160.574.123,00** |
| **4.1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **1.2296.812.569.077,30** | **1.330.504.603.939** | **1.408.604.603.939** | **1.897.976.395.682** | **1.593.859.409.142,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 656.595.362.676,00 | 742.655.074.370 | 802.056.230.480 | 1.201.416.837.101 | 1.031.655.074.370,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 41.339.505.899,00 | 54.524.030.571 | 488.047.857.343 | 564.459.042.465 | 448.203.818.656,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan | 93.255.802.044,00 | 96.362.499.153 | 98.112.499.153 | 111.612.499.153 | 96.112.499.153,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 505.630.898.458,30 | 436.962.999.845 | 20.388.016.963 | 20.488.016.963 | 17.888.016.963,00 |
| **4.2.** | **Pendapatan Transfer** | **5.027.441.135.065,00** | **3.601.709.260.554** | **3.872.507.160.972** | **3.584.146.554.351,00** | **3.180.301.164.981,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 4.200.496.899.027,00 | 2.885.220.501.000 | 3.222.465.762.000 | 3.222.465.762.000 | 2.885.220.501.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 826.944.236.038,00 | 716.488.759.554 | 650.041.398.972 | 361.680.792.351 | 295.080.663.981,00 |
| **4.3.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **37.444.037.547,00** | **30.000.000.000** | **30.000.000.000** | **35.000.000.000,00** | **30.000.000.000,00** |
| 4.3.01 | Hibah | 37.444.037.547,00 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 35.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 |
| 4.3.02 | Pendapatan Lainnya | | | | | |
| 4.3.03 | Pendapatan Dana Desa | | | | | |
| 4.3.04 | Bonus Produksi Panas Bumi | | | | | |
| | **Jumlah Pendapatan** | **6.361.706.741.689,30** | **4.962.213.864.493** | **5.311.111.764.911** | **5.517.122.950.033** | **4.804.160.574.123,00** |

*Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024*

b. Belanja

| No. | Uraian | Realisasi APBD 2023 | RKPD 2024 | APBD 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 (Perubahan RPJMD 2021-2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **BELANJA** | | | | | |
| **5.1.** | **Belanja Operasi** | **4.678.083.749.937** | **4.555.635.629.898** | **4.293.571.503.048** | **4.483.100.518.089** | **3.890.496.088.720,40** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.216.047.125.714 | | 2.261.721.556.705 | 2.549.672.856.037 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.963.883.392.644 | | 1.606.895.200.423 | 1.603.937.868.491 | |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 4.917.515.275 | | 4.454.030.000 | 3.206.670.000 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 451.845.225.376 | | 380.910.631.620 | 267.033.667.261 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 41.600.067.391 | | 39.590.084.300 | 59.249.456.300 | |
| **5.2.** | **Belanja Modal** | **932.737.273.162** | | **754.367.349.525** | **580.921.631.888** | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 41.740.852.806 | | 69.477.265.952 | 33.033.581.950 | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 279.959.190.260 | | 174.508.330.925 | 134.757.609.782 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 239.028.351.288 | | 265.900.611.832 | 158.522.858.952 | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 348.286.032.535 | | 243.674.081.616 | 253.709.531.204 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 23.722.846.273 | | 807.059.200 | 898.050.000 | |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | | | | | |
| **5.3.** | **Belanja Tidak Terduga** | **23.091.418.899** | **77.405.000.000** | **73.000.000.000** | **60.000.000.000** | **100.000.000.000** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 23.091.418.899 | 77.405.000.000 | 73.000.000.000 | 60.000.000.000 | 100.000.000.000,00 |
| **5.4.** | **Belanja Transfer** | **803.442.821.253** | **779.173.234.595** | **807.493.631.748** | **883.100.800.056** | **813.664.485.403** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 78.690.146.109 | 79.717.910.495 | 86.945.638.448 | 131.313.013.944 | 147.985.889.302,60 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 724.752.675.144 | 699.455.324.100 | 720.547.993.300 | 751.787.786.112 | 665.678.596.100,00 |
| | **Jumlah Belanja** | **6.437.564.839.714** | **5.412.213.864.493** | **5.928.432.484.321** | **6.007.122.950.033** | **4.804.160.574.123,00** |
| | **Surplus / (Defisit)** | | **(450.000.000.000)** | **(617.320.719.410)** | **(490.000.000.000)** | |

*Sumber: BAPPERIDA dan BKAD Kabupaten Bandung, 2024*

c. Pembiayaan

| No | Uraian | Realisasi 2023 | RKPD 2024 | APBD 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 (Perubahan RPJMD 2021-2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **PEMBIAYAAN** | | | | | |
| **6.1.** | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **462.584.215.248,92** | **450.000.000.000** | **617.320.719.410** | **500.000.000.000** | **-** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 461.584.215.248,92 | 450.000.000.000 | 617.320.719.410 | 500.000.000.000 | - |
| 6.1.06 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | 1.000.000.000,00 | | | | |
| **6.2.** | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **63.300.000.000,00** | | | **10.000.000.000** | **-** |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 33.300.000.000,00 | | | | |
| 6.2.03 | Pemberian Pinjaman Daerah | 30.000.000.000,00 | | | 10.000.000.000 | - |
| | | | | | | |
| | **Pembiayaan Netto** | **399.284.215.248,92** | **450.000.000.000** | **617.320.719.410** | **490.000.000.000** | **-** |
| | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)** | | **-** | | | |
| | **TOTAL APBD** | | | **5.928.432.484.321** | **6.017.122.950.033** | **-** |

*Sumber: BKAD Kabupaten Bandung, 2024; Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2024*

B. RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkesinambungan.

**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026**

| No | Uraian | APBD 2021 | APBD 2022 | PROYEKSI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **5.** | **BELANJA** | **5.459.221.888.328,00** | **4.885.599.664.118,00** | **5.364.891.685.573,00** | **5.412.213.864.493,00** | **4.788.160.574.123,00** | **4.804.160.574.123,00** |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **4.041.474.583.891,00** | **3.627.718.485.727** | **3.847.999.084.321** | **4.555.635.629.898** | **3.856.096.088.720,40** | **3.890.496.088.720,40** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.211.131.575.887,00 | 2.043.905.064.203,00 | 2.183.009.567.656 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.497.295.577.601,00 | 1.334.534.606.522,00 | 1.359.869.265.415 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 893.987.200,00 | 4.711.012.500,00 | 5.371.695.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 278.434.712.245,00 | 208.740.133.302,00 | 256.884.763.250 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 53.718.730.958,00 | 35.827.669.200,00 | 42.863.793.000 | 0 | 0 | 0 |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **706.782.037.278,00** | **462.342.827.094** | **678.681.776.920** | **0** | **0** | **0** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 13.601.110.403,00 | 29.728.877.000,00 | 42.738.335.412 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 199.931.396.742,00 | 93.466.118.429,00 | 121.826.191.973 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 115.933.435.644,00 | 154.237.707.672,00 | 233.665.814.293 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 345.772.511.299,00 | 183.999.304.338,00 | 279.626.693.442 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 31.543.583.190,00 | 910.819.655,00 | 824.741.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **82.252.745.220,00** | **124.832.692.230** | **43.535.307.437** | **77.405.000.000** | **100.000.000.000** | **100.000.000.000** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 82.252.745.220,00 | 124.832.692.230,00 | 43.535.307.437 | 77.405.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **665.104.052.932,00** | **670.705.659.067** | **794.675.516.895** | **779.173.234.595** | **832.064.485.403** | **813.664.485.403** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 53.524.049.198,00 | 73.440.981.567,00 | 77.907.062.983 | 79.717.910.495,00 | 146.385.889.302,60 | 147.985.889.302,60 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 611.580.003.734,00 | 597.264.677.500,00 | 716.768.453.912 | 699.455.324.100,00 | 685.678.596.100,00 | 665.678.596.100,00 |
| | **Jumlah Belanja** | **5.459.221.888.328,00** | **4.885.599.664.118,00** | **5.364.891.685.573,00** | **5.412.213.864.493,00** | **4.788.160.574.123,00** | **4.804.160.574.123,00** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **254.255.605.462,02** | **-408.076.196.661** | **-602.770.503.150** | **-450.000.000.000** | **0** | **0** |

*Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2023*

C. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program kerja merupakan kumpulan dari kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 33.490.971.422,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Bandung. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, yaitu:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPERIDA TAHUN 2025**
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**
**KABUPATEN BANDUNG**

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| **5** | **01** | **01** | **00** | **00** | **00** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **- Nilai AKIP<br>- Persentase BMD dalam kondisi baik** | **- 83,55<br>- 98,72** | **Point<br>%** | **23.411.375.422** | **- 83,60<br>- 98,74** | **Point<br>%** | **16.098.812.048** | **Bapperida** |
| **5** | **01** | **01** | **2** | **01** | **00** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu** | **100** | **%** | **329.500.000** | **100** | **%** | **227.500.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | Dok | 125.000.000 | 2 | Dok | 90.000.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | Dok | 5.000.000 | 2 | Dok | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | Dok | 5.000.000 | 2 | Dok | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 | Dok | 5.000.000 | 2 | Dok | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | Dok | 5.000.000 | 2 | Dok | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | Laporan | 26.000.000 | 2 | Laporan | 40.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Laporan | 88.500.000 | 1 | Laporan | 47.500.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 | Dokumen | 35.000.000 | 1 | Dokumen | 5.000.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 3 | Data | 35.000.000 | 3 | Data | 5.000.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **01** | **2** | **02** | **00** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu** | **100** | **%** | **14.469.177.422** | **100** | **%** | **13.103.614.048** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 51 | Orang /Bulan | 14.349.177.422 | 51 | Orang/ Bulan | 13.037.614.048 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | Dok | 10.000.000 | 12 | Dok | 11.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | Laporan | 50.000.000 | 2 | Laporan | 20.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 | Dok | 5.000.000 | 2 | Dok | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 12 | Laporan | 50.000.000 | 12 | Laporan | 15.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 10.000.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| **5** | **01** | **01** | **2** | **03** | **00** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100** | **%** | **20.000.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | 5.000.000 | 1 | Dokumen | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | Laporan | 5.000.000 | 1 | Laporan | 10.000.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **01** | **2** | **05** | **00** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu** | **100** | **%** | **391.500.000** | **100** | **%** | **135.000.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 | Paket | 31.500.000 | 1 | Paket | 20.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | Dokumen | 10.000.000 | 1 | Dokumen | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | Dokumen | 10.000.000 | 1 | Dokumen | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 | Dokumen | 40.000.000 | 1 | Dokumen | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 | Orang | 300.000.000 | 10 | Orang | 85.000.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **01** | **2** | **06** | **00** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan** | **100** | **%** | **2.554.198.000** | **100** | **%** | **384.000.000** | **Bapperida** |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| | | | | | | | **Administrasi Umum Kantor** | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 50.000.000 | 1 | Paket | 20.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 1.996.400.000 | 1 | Paket | 100.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Paket | 20.000.000 | 1 | Paket | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan | 1 | Paket | 100.000.000 | 1 | Paket | 50.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 29.198.000 | 1 | Paket | 30.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | Dok | 35.000.000 | 1 | Dok | 24.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | Laporan | 73.600.000 | 12 | Laporan | 50.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | 250.000.000 | 12 | Laporan | 100.000.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **01** | **2** | **07** | **00** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100** | **%** | **1.632.000.000** | **100** | **%** | **100.000.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | 0 | Unit | 0 | 1 | Unit | 30.000.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| | | | | | | | Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 | Unit | 732.000.000 | 0 | Unit | - | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 | Paket | 900.000.000 | 1 | Paket | 50.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | Unit | - | 1 | Unit | 10.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | Unit | - | 1 | Unit | 10.000.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **01** | **2** | **08** | **00** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **2.575.000.000** | **100** | **%** | **1.693.698.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Laporan | 5.000.000 | 12 | Laporan | 20.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 305.000.000 | 12 | Laporan | 201.944.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 2.265.000.000 | 12 | Laporan | 1.471.754.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **01** | **2** | **09** | **00** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase BMD dalam kondisi baik** | **100** | **%** | **1.450.000.000** | **100** | **%** | **435.000.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang | 24 | Unit | 100.000.000 | 24 | Unit | 145.000.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | | |
| | | | | | | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 | Unit | 150.000.000 | 20 | Unit | 50.000.000 | | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 900.000.000 | 1 | Unit | 100.000.000 | | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | Unit | 0 | 1 | Unit | 20.000.000 | | Bapperida |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 300.000.000 | 1 | Unit | 120.000.000 | | Bapperida |
| **Jumlah 1** | | | | | | | | | | **23.411.375.422** | | | **16.098.812.048** | | **Bapperida** |
| **5** | **01** | **02** | | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Capaian nilai PPD** | **90,9** | **%** | **3.405.096.000** | **92** | **%** | **2.828.130.200** | | **Bapperida** |
| **5** | **01** | **02** | **2** | **01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan**<br>**- Persentase berita acara yang disahkan** | **100**<br>**100** | **%**<br>**%** | **2.066.513.600** | **100**<br>**100** | **%**<br>**%** | **1.526.231.000** | | **Bapperida** |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 2 | Dok | 405.864.400 | 1 | Dok | 273.314.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 3 | Dok | 103.027.400 | 3 | Dok | 114.343.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 | Berita Acara | 313.404.000 | 1 | Berita Acara | 250.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 | Berita Acara | 207.728.200 | 1 | Berita Acara | 200.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 | Berita Acara | 597.879.800 | 1 | Berita Acara | 420.657.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 3 | Dok | 438.609.800 | 2 | Dok | 267.917.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **02** | **2** | **02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah** | **100** | **%** | **609.553.000** | **100** | **%** | **609.553.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 3 | Dok | 146.200.000 | 3 | Dok | 146.200.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | - Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi<br>- Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi | 68<br>1 | Orang<br>Aplikasi | 333.582.000 | 68<br>1 | Orang<br>Aplikasi | 333.582.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 02 | 0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 | Buku | 129.771.000 | 1 | Buku | 129.771.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **02** | **2** | **03** | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik** | **95,8** | **%** | **581.200.000** | **96** | **%** | **514.200.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 | Laporan | 231.200.000 | 1 | Laporan | 231.200.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 | Laporan | 350.000.000 | 2 | Laporan | 283.000.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **02** | **2** | **04** | | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **Persentase ketersediaan dokumen SIPD** | **100** | **%** | **147.829.400** | **100** | **%** | **178.146.200** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota | 1 | Dokumen | 147.829.400 | 1 | Dokumen | 178.146.200 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| **5** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **'- Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD**<br>**- Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD**<br>**- Presentase muatan RKA dengan RKPD** | **97,8**<br>**97,8**<br>**97,8** | **%**<br>**%**<br>**%** | **3.674.500.000** | **98**<br>**98**<br>**98** | **%**<br>**%**<br>**%** | **2.674.500.000** | **Bapperida** |
| **5** | **01** | **03** | **2** | **01** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**<br>**2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**<br>**3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **97,8**<br>**97,8**<br>**97,8** | **%**<br>**%**<br>**%** | **1.292.500.000** | **98**<br>**98**<br>**98** | **%**<br>**%**<br>**%** | **892.500.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 | Dok | 367.433.300 | 1 | Dok | 200.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan | 38 | Laporan | 72.389.000 | 38 | Laporan | 118.500.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| | | | | | | | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 | Laporan | 90.244.800 | 1 | Laporan | 97.500.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 | Dok | 561.749.900 | 1 | Dok | 259.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 11 | Laporan | 100.465.000 | 11 | Laporan | 122.500.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 11 | Laporan | 100.218.000 | 11 | Laporan | 95.000.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| **5** | **01** | **03** | **2** | **02** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA**<br>**2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA**<br>**3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA** | **97,8**<br>**97,8**<br>**97,8** | **%**<br>**%**<br>**%** | **1.171.000.000** | **98**<br>**98**<br>**98** | **%**<br>**%**<br>**%** | **871.000.000** | **Bapperida** |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 | Dok | 184.000.000 | 1 | Dok | 109.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 8 | Laporan | 270.459.000 | 8 | Laporan | 195.459.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 8 | Laporan | 163.650.000 | 8 | Laporan | 163.650.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| | | | | | | | Bidang Perekonomian | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 | Dok | 184.000.000 | 1 | Dok | 109.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 8 | Laporan | 202.541.000 | 8 | Laporan | 127.541.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 8 | Laporan | 166.350.000 | 8 | Laporan | 166.350.000 | Bapperida |
| **5** | **01** | **03** | **2** | **03** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**<br>**2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**<br>**3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang** | **97,8**<br>**97,8**<br>**97,8** | **%**<br>**%**<br>**%** | **1.211.000.000** | **98**<br>**98**<br>**98** | **%**<br>**%**<br>**%** | **911.000.000** | **Bapperida** |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| | | | | | | | **Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 | Dok | 300.000.000 | 1 | Dok | 200.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 8 | Laporan | 100.000.000 | 8 | Laporan | 100.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 8 | Laporan | 262.430.000 | 8 | Laporan | 162.430.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 | Dok | 300.000.000 | 1 | Dok | 200.000.000 | Bapperida |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 8 | Laporan | 123.000.000 | 8 | Laporan | 123.000.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 8 | Laporan | 125.570.000 | 8 | Laporan | 125.570.000 | Bapperida |
| **5** | **05** | **02** | | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan**<br>**- Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan** | **60**<br>**60** | **%**<br>**%** | **3.000.000.000** | **70**<br>**70** | **%**<br>**%** | **4.001.000.000** | **Bapperida** |
| **5** | **05** | **02** | **2** | **01** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan** | **100** | **%** | **300.000.000** | **100** | **%** | **378.000.000** | **Bapperida** |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 1 | Laporan | 300.000.000 | 1 | Laporan | 378.000.000 | Bapperida |
| **5** | **05** | **02** | **2** | **02** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan** | **100** | **%** | **450.000.000** | **100** | **%** | **992.000.000** | **Bapperida** |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 | Dok | 450.000.000 | 1 | Dok | 292.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 100.000.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak | Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 100.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 100.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 100.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 100.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 100.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 02 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 100.000.000 | Bapperida |
| **5** | **05** | **02** | **2** | **03** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan** | **100** | **%** | **750.000.000** | **100** | **%** | **1.742.357.060** | **Bapperida** |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 | Dok | 100.000.000 | 1 | Dok | 132.623.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan | 1 | Dok | 150.000.000 | 1 | Dok | 173.149.000 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| | | | | | | | Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 189.060.860 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 | Dok | 175.000.000 | 1 | Dok | 103.394.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 1 | Dok | 0 | 1 | Dok | 111.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral | 1 | Dok | 125.000.000 | 1 | Dok | 168.264.600 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 1 | Dok | 200.000.000 | 1 | Dok | 116.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0008 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | 1 | Dok | 0 | 1 | Dok | 116.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 1 | Dok | 0 | 1 | Dok | 116.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 116.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 157.095.600 | Bapperida |

| Kode Rekening | | | | | | Uraian | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Anggaran | | | | | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Renja 2025 | Target Capaian Kinerja | | Perkiraan Maju Renja 2026 | |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0012 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 100.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 03 | 0013 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | 0 | Dok | 0 | 1 | Dok | 143.770.000 | Bapperida |
| **5** | **05** | **02** | **2** | **04** | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi** | **100** | **%** | **1.500.000.000** | **100** | **%** | **888.642.940** | **Bapperida** |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 | Dok | 950.000.000 | 1 | Dok | 292.000.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 0 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 219.613.300 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 1 | Laporan | 550.000.000 | 1 | Laporan | 217.700.000 | Bapperida |
| 5 | 05 | 02 | 2 | 04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 0 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 159.329.640 | Bapperida |
| **Jumlah 2** | | | | | | | | | | **10.079.596.000** | | | **9.503.630.200** | **Bapperida** |
| **Jumlah Total** | | | | | | | | | | **33.490.971.422** | | | **25.602.442.248** | **Bapperida** |

***Sumber: Renja Bapperida Tahun 2025***

2.2. Sumber Daya manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung. Ketersediaan dan kualitas SDM yang memadai menjadi syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. SDM di BAPPERIDA terdiri dari berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan yang relevan dengan tugas dan fungsi organisasi. Sebagian besar pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, baik di bidang perencanaan wilayah dan kota, ekonomi, teknik, administrasi negara, maupun bidang-bidang lainnya yang mendukung proses perencanaan. Selain pendidikan formal, pegawai juga secara aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan nonformal seperti diklat teknis, workshop, bimtek, hingga sertifikasi kompetensi guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

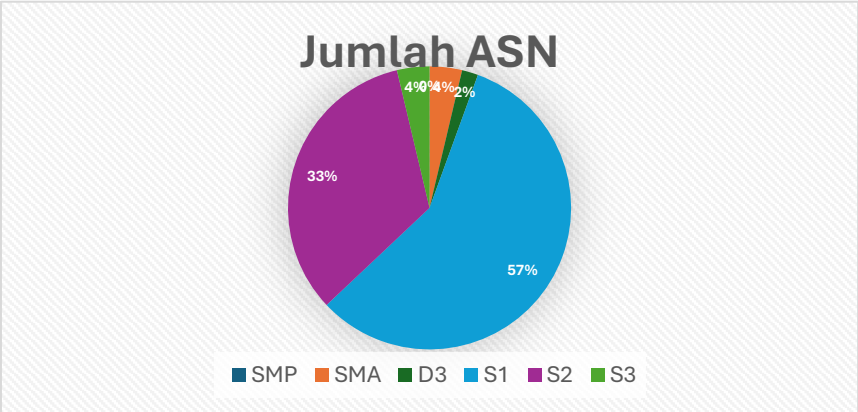
Sumber daya manusia pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung, berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung pada Tahun 2025.

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2025**

| No | Pendidikan | Jumlah ASN | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SMP | 0 | 0 |
| 2 | SMA | 4 | 6.78 |
| 3 | D3 | 2 | 3.39 |
| 4 | S1 | 34 | 57.63 |
| 5 | S2 | 17 | 28.81 |
| 6 | S3 | 2 | 3.39 |
| **TOTAL** | | **59** | **100** |

*Sumber : DUK BAPPERIDA Tahun 2025*




Gambar: 2.2
**Proporsi Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2025**

Tabel 2.1 menunjukkan, Struktur tingkat pendidikan pegawai di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung menunjukkan kecenderungan positif dalam hal kualifikasi akademik. Berdasarkan data yang tersedia, tidak terdapat pegawai dengan jenjang pendidikan SMP (0%), yang menandakan bahwa seluruh pegawai telah menempuh pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sebanyak 6,78% pegawai berpendidikan SMA, sementara yang berlatar belakang pendidikan Diploma III (D3) berjumlah 3,39%. Komposisi terbesar berasal dari lulusan Strata 1 (S1), yaitu mencapai 57,63%, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki dasar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan. Selanjutnya, sebanyak 28,81% pegawai telah menempuh pendidikan Strata 2 (S2), yang mencerminkan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi pada tingkat manajerial dan analitis yang lebih tinggi. Bahkan terdapat 3,39% pegawai dengan kualifikasi Strata 3 (S3), yang merupakan aset penting dalam pengembangan kebijakan berbasis riset dan kajian mendalam.

Komposisi ini menunjukkan bahwa BAPPERIDA Kabupaten Bandung didukung oleh sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi dan memiliki potensi besar dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis pengetahuan, analisis, dan inovasi. Upaya peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal ini sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan kompleksitas tantangan pembangunan daerah ke depan.

Sumber daya manusia di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung tidak hanya dilihat dari aspek pendidikan, tetapi juga dari jenjang kepangkatan atau golongan yang dimiliki oleh para pegawai. Komposisi golongan ini mencerminkan struktur organisasi, jenjang karir, serta pengalaman yang dimiliki oleh aparatur perencana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pegawai BAPPERIDA tersebar pada berbagai tingkat golongan, mulai dari golongan II sebagai jenjang awal, hingga golongan IV sebagai jenjang tertinggi dalam struktur Aparatur Sipil Negara. Keberagaman golongan ini menjadi indikator adanya kesinambungan antara pegawai senior yang berpengalaman dengan pegawai muda yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Distribusi yang proporsional antar golongan juga menunjukkan adanya pola pembinaan karir yang baik serta perencanaan kebutuhan SDM yang terarah. Hal ini menjadi salah satu kekuatan dalam membentuk tim kerja yang solid, sinergis, dan adaptif terhadap dinamika serta tantangan pembangunan di Kabupaten Bandung. Dengan komposisi golongan yang berimbang dan pengelolaan karir yang berkelanjutan, BAPPERIDA Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

**Tabel 2.2**
**Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025**

| No | Golongan | Jumlah ASN | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Golongan I | 0 | 0 |
| 2 | Golongan II | 2 | 3.70 |
| 3 | Golongan III | 36 | 59.26 |
| 4 | Golongan IV | 11 | 24.07 |
| 5 | Kelas Jabatan IX, VII, V | 10 | 12.96 |
| **TOTAL** | | **59** | **100.00** |

*Sumber : DUK BAPPERIDATahun 2025*

Komposisi pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan golongan dan kelas jabatan menunjukkan struktur sumber daya manusia yang relatif solid dan mencerminkan kematangan organisasi dalam aspek kepegawaian. Dari sisi golongan, tidak terdapat pegawai di Golongan I (0%), yang artinya seluruh pegawai telah melampaui jenjang kepangkatan terendah dan berada pada posisi yang lebih tinggi. Ini merupakan indikator positif bahwa SDM yang tersedia telah melewati tahap dasar dalam jenjang karir ASN.

Sebanyak 3,70% pegawai berada pada Golongan II, yang umumnya mencakup staf pelaksana dengan masa kerja yang masih relatif pendek. Mayoritas pegawai, yaitu 59,26%, berada pada Golongan III. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur telah memiliki pengalaman kerja yang cukup dan menduduki posisi fungsional maupun struktural pada level operasional dan teknis menengah. Adapun 24,07% pegawai berada pada Golongan IV, yang merupakan golongan senior dengan tanggung jawab yang lebih besar, biasanya menjabat pada level strategis seperti pejabat administrator atau pejabat fungsional madya dan utama. yang mencerminkan jabatan dengan bobot tanggung jawab tinggi dan fungsi pengambilan keputusan penting dalam organisasi. Proporsi ini menunjukkan bahwa BAPPERIDA memiliki sejumlah jabatan inti yang berperan sebagai pengarah, pengelola kebijakan, dan pengendali pelaksanaan program perencanaan pembangunan. Sementara itu, sebanyak 12,96% pegawai menempati Kelas Jabatan IX, VII dan V.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Penganggaran ini merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Anggaran Layanan Informasi Publik dialokasikan untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan layanan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat. Penggunaan anggaran tersebut mencakup pembiayaan kegiatan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik. Adapun anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 adalah:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 554.310.000,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 1.789.016.200,-
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp 13.998.400,-
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sebesar Rp 297.351.103,-

# BAB III
# PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Jumlah PermintaaN Informasi Publik

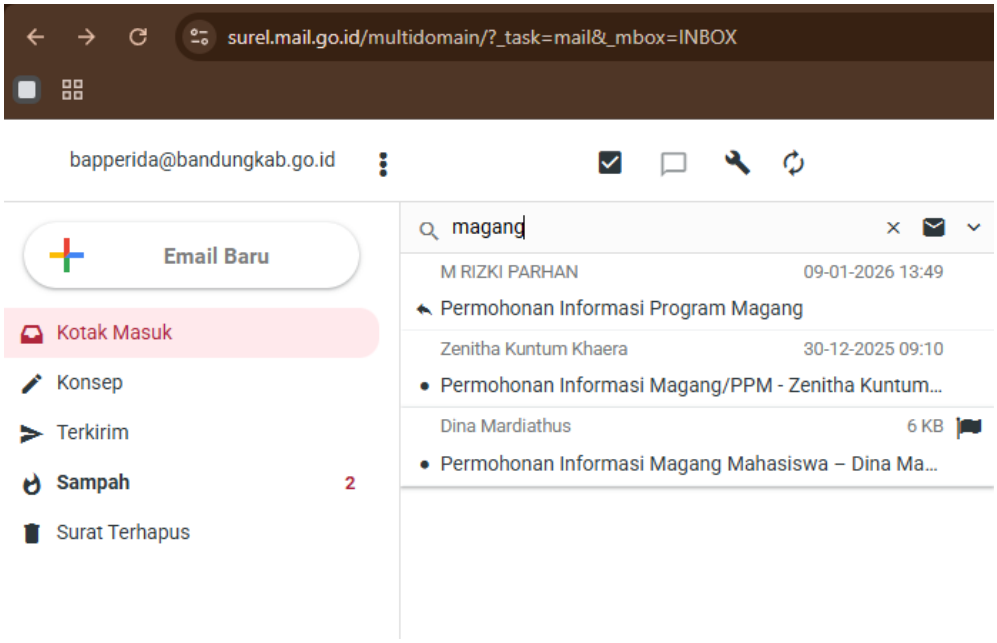
Pada tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menerima sejumlah permintaan informasi publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai kanal layanan informasi yang tersedia. Permintaan informasi tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi, khususnya terkait perencanaan pembangunan daerah, riset, dan inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Permintaan informasi publik yang diterima oleh Bapperida umumnya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi program serta kegiatan, hasil kajian dan penelitian, serta informasi pendukung lainnya yang menjadi kewenangan Bapperida. Seluruh permintaan informasi yang masuk dicatat dan dikelola secara tertib oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil pencatatan dan pengelolaan permintaan informasi publik, Bapperida telah menindaklanjuti setiap permohonan informasi yang diterima sesuai dengan prosedur dan jangka waktu pelayanan yang ditetapkan. Informasi yang dimohonkan pada umumnya dapat dipenuhi dan disampaikan kepada pemohon secara tepat waktu, baik melalui pemberian salinan dokumen, penjelasan tertulis, maupun akses informasi melalui media elektronik.

Berikut ini kami lampirkan informasi publik di Bapperida Kabupaten Bandung, melalui:

A. Email bapperida@bandungkab.go.id:
   1. Permohonan Magang dari Muhamad Rizki Parhan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.
   2. Permohonan Magang dari Zenitha Kuntum Khaera, Mahasiswi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
   3. Permohonan Magang dari Dina Mardiathus, mahasiswa semester 3 Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Pasundan.

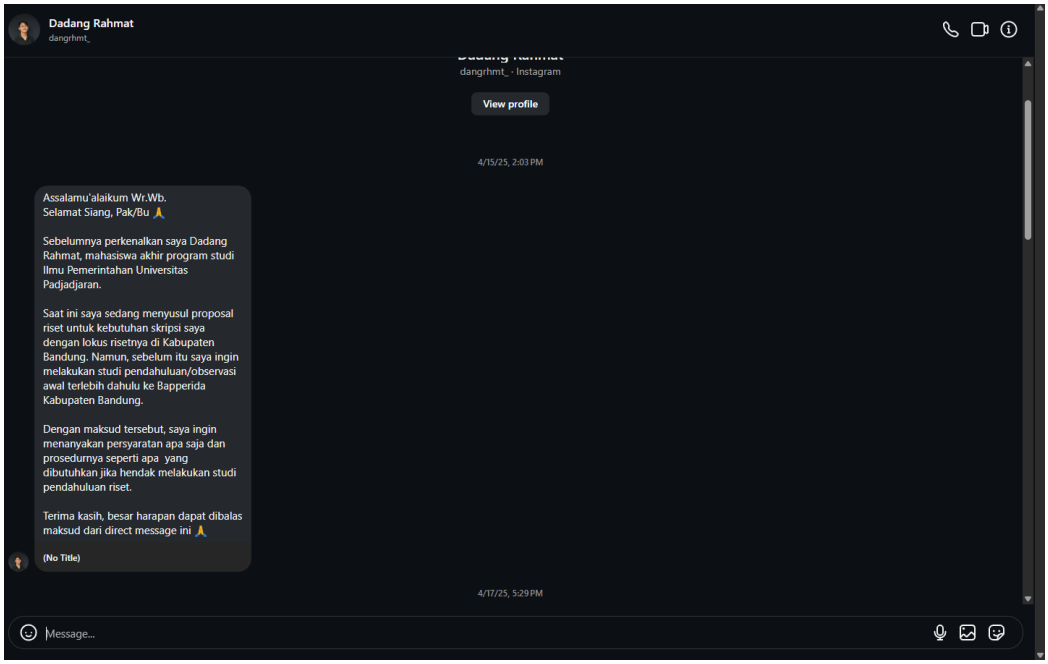



4. Permohonan Data Pertumbuhan Ekonomi UMKM dari Dea Rodiah Luthfy Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
5. Permohonan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dari Bazna kabupaten Bandung

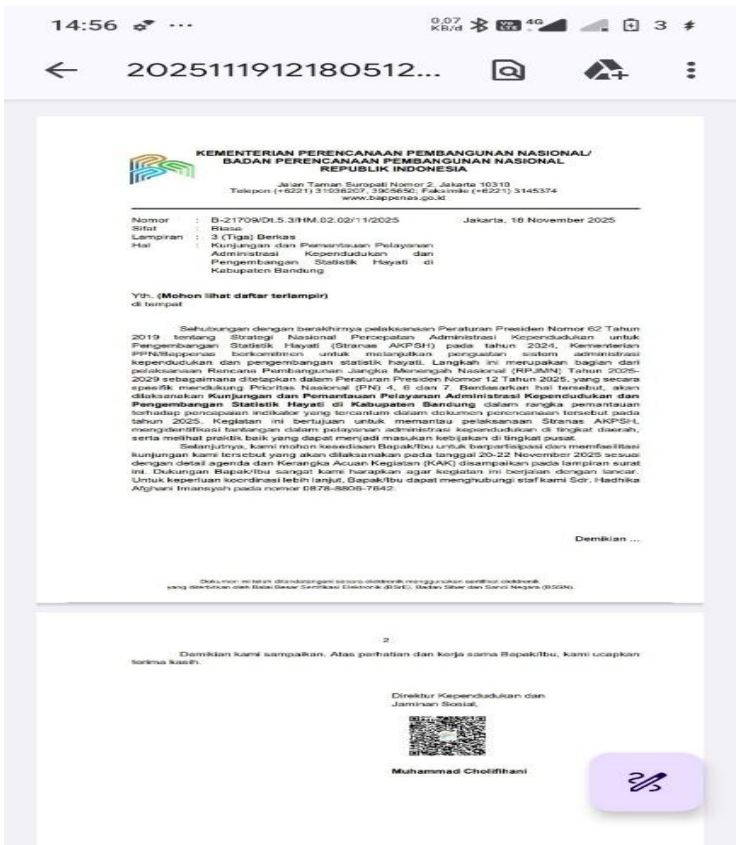



B. Media Sosial:

1. Pengajuan Riset dari Dadang Rahmat, mahasiswa akhir program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran.




2. Permintaan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan layanan adminduk dan pengembangan sstatistik hayati



3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Permintaan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon akan diproses secara cepat, tepat, dan sederhana dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas serta kehati-hatian dalam pengelolaan informasi.

Bapperida Kabupaten Bandung melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal informasi yang dimohonkan memerlukan penelusuran lebih lanjut, koordinasi lintas unit kerja, atau pertimbangan tertentu, maka jangka waktu pelayanan dapat **diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja**, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi.

Selama proses pemenuhan permintaan informasi publik, Bapperida Kabupaten Bandung memastikan bahwa setiap tahapan pelayanan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan klasifikasi informasi yang berlaku. Apabila informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan, maka PPID akan menyampaikan penolakan disertai alasan yang jelas dan dasar hukum yang sah.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Dalam periode pelaporan tersebut, tidak seluruh permintaan informasi publik dapat dipenuhi secara langsung, terutama apabila informasi yang dimohonkan memerlukan proses pengumpulan data lebih lanjut atau termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap permintaan tersebut, Bapperida memberikan penjelasan dan tanggapan kepada pemohon sesuai mekanisme layanan informasi publik yang berlaku.

Secara umum, jumlah dan karakteristik permintaan informasi publik yang diterima oleh Bapperida menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Melalui evaluasi ini, Bapperida terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan informasi, penyediaan sarana layanan, serta peningkatan kapasitas aparatur, sehingga penyelenggaraan layanan informasi publik dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak

Berdasarkan hasil pencatatan dan dokumentasi pelayanan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, selama Tahun 2025 tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.

Seluruh permintaan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat telah ditindaklanjuti dan dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan klasifikasi informasi serta prinsip keterbukaan informasi publik. Informasi yang dimohonkan dapat diberikan secara utuh atau sebagian sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan informasi yang dikelola oleh Bapperida Kabupaten Bandung.

# BAB IV
# RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

4.1. Keberatan Informasi Publik

Berdasarkan hasil pencatatan dan pengelolaan layanan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, selama Tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik dari Pemohon Informasi.

Seluruh permintaan informasi publik yang diterima telah dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek waktu pelayanan, prosedur, maupun substansi informasi yang diberikan. Tidak adanya pengajuan keberatan tersebut mencerminkan bahwa pelayanan informasi publik pada Bapperida Kabupaten Bandung telah dilaksanakan secara transparan, responsif, dan memenuhi hak masyarakat atas akses informasi publik.

4.2. Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik

Berdasarkan hasil pencatatan dan pengelolaan layanan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, selama Tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik dari Pemohon Informasi. Oleh karena itu, tidak terdapat tanggapan atas keberatan informasi publik yang harus disampaikan oleh PPID Bapperida Kabupaten Bandung pada tahun dimaksud.

4.3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- Komisi Informasi akan memproses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau sidang ajudikasi nonlitigasi paling lambat 100 hari kerja sejak permohonan sengketa diterima.
- Jika tercapai kesepakatan melalui mediasi, Komisi Informasi akan menetapkan putusan atas sengketa informasi tersebut.
- Jika mediasi tidak berhasil, Komisi Informasi akan melanjutkan proses penyelesaian melalui ajudikasi.

4.4. Mediasi dan/atau Ajudiasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pemantauan dan pencatatan penanganan sengketa informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, selama Tahun 2025 tidak terdapat proses mediasi dan/atau ajudikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang melibatkan Bapperida Kabupaten Bandung.

Tidak adanya proses mediasi dan/atau ajudikasi tersebut disebabkan karena tidak terdapat pengajuan sengketa informasi publik yang berasal dari keberatan Pemohon Informasi terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan. Seluruh permintaan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan

- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Bapperida Kabupaten Bandung senantiasa berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
- Sehubungan dengan indikator jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan**, hingga** saat ini Bapperida Kabupaten Bandung belum menerima maupun menghadapi gugatan hukum dari pihak mana pun. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.
- Bapperida Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus mempertahankan kualitas tata kelola kelembagaan, meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat upaya pencegahan potensi sengketa hukum melalui peningkatan kepatuhan regulasi dan pelayanan yang responsif.

4.6. Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Berdasarkan hasil pencatatan dan pemantauan penanganan perkara terkait keterbukaan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, selama Tahun 2025 tidak terdapat putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa informasi publik, serta tidak terdapat pelaksanaan putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti oleh Bapperida Kabupaten Bandung.

Kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya sengketa informasi publik yang berlanjut ke proses peradilan. Seluruh permintaan informasi publik telah dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan.

# BAB V
# KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 5.1. Kendala Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya tenaga petugas pelayanan informasi publik yang kompeten dapat menghambat proses penyampaian informasi kepada masyarakat.
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Fasilitas penunjang yang belum memadai, seperti kurangnya perangkat teknologi informasi atau belum adanya website khusus untuk layanan informasi publik, dapat menghambat akses dan distribusi informasi.
c. Kurangnya Pemahaman tentang Regulasi: Minimnya pengetahuan internal mengenai regulasi terkait keterbukaan informasi publik dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyampaian informasi.
d. Sulitnya Koordinasi Antar Unit: Kesulitan dalam berkoordinasi dengan unit atau departemen lain di dalam organisasi dapat memperlambat proses pengumpulan dan penyampaian informasi.
e. Ketergantungan pada Unit Lain: Tingginya ketergantungan pada unit lain untuk memperoleh informasi yang diminta oleh publik dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan informasi.

## 5.2. Kendala Eksternal

Pelaksanaan layanan informasi publik seringkali menghadapi berbagai kendala eksternal yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensinya. Beberapa kendala eksternal yang umum dihadapi antara lain:

a. **Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Layanan Informasi Publi**k: Meskipun masyarakat telah mengetahui adanya layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), banyak yang belum memahami secara mendalam fungsi dan prosedur layanan tersebut. Hal ini mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik.
b. **Minimnya Permohonan Informasi**: Beberapa instansi melaporkan rendahnya jumlah permohonan informasi yang diterima. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk memperoleh informasi publik.
c. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana:** Keterbatasan fasilitas fisik, seperti kurangnya ruang khusus untuk pelayanan informasi publik, dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.

d. **Ketergantungan pada Unit Lain:** Proses koordinasi yang kompleks dengan unit atau departemen lain dalam sebuah organisasi dapat memperlambat penyediaan informasi kepada publik.
e. **Kurangnya Edukasi Publik:** Minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan cara mengaksesnya menyebabkan rendahnya permintaan dan partisipasi dalam layanan informasi publik.

# BAB VI
# REKOMENDASI DAN RENCANA TIDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

## 1. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu merupakan langkah yang strategis untuk memastikan pelayanan informasi publik yang efektif dan transparan, meliputi:

- Mengadakan pelatihan dan lokakarya secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan PPID Pembantu dalam mengelola informasi publik.
- Mengadakan rapat koordinasi untuk membahas strategi peningkatan kapasitas dan pengelolaan pelayanan informasi.
- Mendorong PPID Pembantu untuk lebih aktif dan proaktif dalam bekerja, serta memastikan respon cepat terhadap permintaan informasi publik.
- Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk membiayai peningkatan kapasitas PPID Pembantu dan kegiatan layanan informasi publik.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan PPID Pembantu dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat.

## 2. Penguatan Infrastruktur Digital

Penguatan infrastruktur digital bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik, meliputi:

- Membangun dan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan dan distribusi informasi publik.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital bagi SDM PPID Pembantu melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Optimalisasi literasi digital dapat memperkuat kinerja pemerintahan dalam pengelolaan informasi.
- Memastikan ketersediaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk operasional PPID Pembantu, termasuk jaringan internet yang stabil dan aman.
- Membangun platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi publik.

- Pembentukan Forum Koordinasi PPID: Membentuk forum koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan PPID Pembantu dapat memberikan layanan informasi publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3. **Sosialisasi kepada Masyarakat**
   - Menggunakan platform digital seperti media sosial dan situs web resmi untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time. Hal ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan mudah dan cepat.
   - Melaksanakan sosialisasi internal di lingkungan instansi pemerintah untuk memastikan pemahaman yang sama tentang standar layanan informasi publik.
   - Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi dan bagaimana mereka dapat mengakses layanan informasi publik.
   - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelayan informasi publik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
   - Bekerja sama dengan lembaga penyiaran publik untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, sehingga meningkatkan pengetahuan dan partisipasi mereka.
4. **Kolaborasi dengan Lembaga Terkait:**

   Kolaborasi dengan lembaga terkait merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan informasi publik, antara lain:
   - Mengadakan pertemuan atau lokakarya dengan lembaga lain untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.
   - Mengadakan rapat koordinasi dengan PPID dari berbagai instansi untuk menjalin komunikasi dan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan terkait keterbukaan informasi publik.
   - Bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi lain untuk mengembangkan program yang mendukung keterbukaan informasi.
   - Berkolaborasi dengan lembaga lain untuk mengadakan pelatihan atau workshop guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik.
   - Bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengembangkan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung layanan informasi publik yang lebih efektif dan efisien.

## BAB VII
## PENUTUP

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan layanan informasi publik masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan layanan di masa mendatang. Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi masyarakat, sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pembantu Bapperida Kabupaten Bandung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Dengan adanya laporan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pembantu dalam memberikan layanan informasi publik.

Laporan ini menjadi wujud komitmen Bapperida Kabupaten Bandung dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini, layanan informasi publik dapat lebih optimal, mendukung pembangunan daerah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan terpercaya.

Soreang, 21 Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

**H. MARLAN, S.IP., M.Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 196712231988031007